

Tekanan Fiskal dan Keberlanjutan Penganggaran Modal pada Sektor Pemerintah: Pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis

Authors:

Lilis Marlina¹
Fifi Yusmita²
Syukrie Abdullah³

Affiliations:

¹Departemen Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas
Teuku Umar, Meulaboh,
Indonesia

^{2,3}Departemen Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Syiah Kuala, Banda
Aceh, Indonesia

Corresponding Author:

Lilis Marlina

Emails:

lilismarlina@utu.ac.id¹
fifiyusmitaaceh@gmail.com²
syukrieabdullah@unsyiah.ac.id³

Article History:

Received: June 1st, 2022
Revised : November 11th, 2022
Accepted: December 28th, 2022

How to cite this article:

Marlina, L., Yusmita, F., & Abdullah, S. (2023). Tekanan Fiskal dan Keberlanjutan Penganggaran Modal pada Sektor Pemerintah: Pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 14-31. doi: <https://doi.org/10.35138/organum.v6i1.273>

Journal Homepage:

<http://ejournal.winayamukti.ac.id/index.php/Organum/index>

Copyright:

© 2023. Published by
Organum: Jurnal Saintifik
Manajemen dan Akuntansi.
Faculty of Economics and
Business. Winaya Mukti
University.



Abstract. *Fiscal stress faced by local governments over the years can be a threat to the sustainability of capital budgeting in providing public goods and services. The purpose of the research is to map the trends of scientific publications and the most prominent types of research, and to synthesize research results on the relationship between capital budgeting practices and fiscal stress in the government sector. The method be elected in this study is a systematic literature review with reviews and analyzes systematically the effect of fiscal stress on the sustainability of capital budgeting published in reputable international journals indexed by Scopus. Based on the results of the study, it was found that: first, the first research on the relationship between capital budgeting and fiscal stress was carried out in the 1980-1989 time period. Then research on this topic is increasing in the period 2000-2020. Second, the most dominating type of research is quantitative (63%). While the remaining 37% are qualitative studies. Third, the development of research results on the relation among capital budgeting and fiscal stress in the government sector still gives different responses among researchers. This study contributes to providing a comprehensive review of the development capital budgeting research in a situation where the government is facing fiscal stress, and is useful for practitioners in allocating resources for the sustainability of capital budgeting in the government sector.*

Keywords: *Capital budgeting; capital project; fiscas stress; recession.*

Abstrak. *Fiscal stress yang dihadapi oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan penganggaran modal dalam menyediakan barang dan jasa publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan tren publikasi ilmiah dan jenis penelitian yang paling menonjol, serta mensintesis hasil-hasil penelitian tentang hubungan praktik penganggaran modal dan *fiscal stress* di sektor pemerintahan. Metode yang dipilih dalam penelitian ini yaitu *systematic literature review* dengan meninjau dan menganalisis secara sistematis tentang efek *fiscal stress* terhadap keberlanjutan penganggaran modal yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: pertama, penelitian pertama tentang hubungan *capital budgeting* dan *fiscal stress* mulai dilakukan pada periode waktu tahun 1980-1989. Kemudian, penelitian tentang topik ini semakin meningkat di periode tahun 2000-2020. Kedua, jenis penelitian yang paling mendominasi adalah kuantitatif (63%). Sedangkan, sisanya 37% merupakan studi kualitatif. Ketiga, perkembangan hasil penelitian tentang hubungan antara penganggaran modal dan *fiscal stress* di sektor pemerintahan masih memberikan respons yang berbeda-beda di antara para peneliti. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan tinjauan secara komprehensif mengenai perkembangan riset penganggaran modal dalam situasi pemerintah menghadapi *fiscal stress*, serta berguna bagi para praktisi dalam pengalokasian sumber daya untuk keberlanjutan penganggaran modal di sektor pemerintah.*

Kata Kunci: *Penganggaran modal; proyek modal; *fiscal stress*; resesi.*

Pendahuluan

Penganggaran modal adalah salah satu keputusan yang sangat mendesak bagi manajemen keuangan organisasi mana pun (Batra & Verma, 2014). Penganggaran modal

secara luas dianggap sebagai alat "pemerintah yang baik" untuk mengelola masalah keuangan dengan mengalokasikan sumber daya, dan mengelola utang (Doss, 1987; Forrester, 1993). Penganggaran modal terbukti menjadi komponen penting dari kondisi keuangan pemerintah dan sering digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah (Bunch, 1996). Gagasan yang mendasari manfaat penganggaran modal adalah untuk menambah nilai melalui informasi (Gordon, 1998). Dengan informasi yang lebih baik, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka, berinvestasi dalam proyek-proyek dengan kebutuhan prioritas tinggi dan perencanaan untuk masa depan. Dengan demikian, penganggaran modal merupakan mekanisme perencanaan yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk membuat keputusan evaluasi tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya di antara proyek-proyek investasi (Al-Mutairi et al., 2018).

Sementara itu, organisasi yang berbeda menggunakan pengambilan keputusan yang berbeda untuk mengadopsi keputusan terkait dengan penganggaran modal (Brijlal & Quesada, 2009). Pertama, keputusan penanaman modal secara signifikan memengaruhi tingkat pertumbuhan organisasi dan membuat keputusan yang salah dapat merusak organisasi. Kedua, keputusan yang seperti itu membutuhkan dana dalam jumlah besar. Selanjutnya Arnold & Hatzopoulos (2000) mengatakan bahwa menilai proposal penganggaran modal adalah bagian dari keputusan untuk melakukan investasi. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan penanaman modal merupakan hal yang mendasar bagi kelangsungan dan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang (Bennouna, et al., 2010).

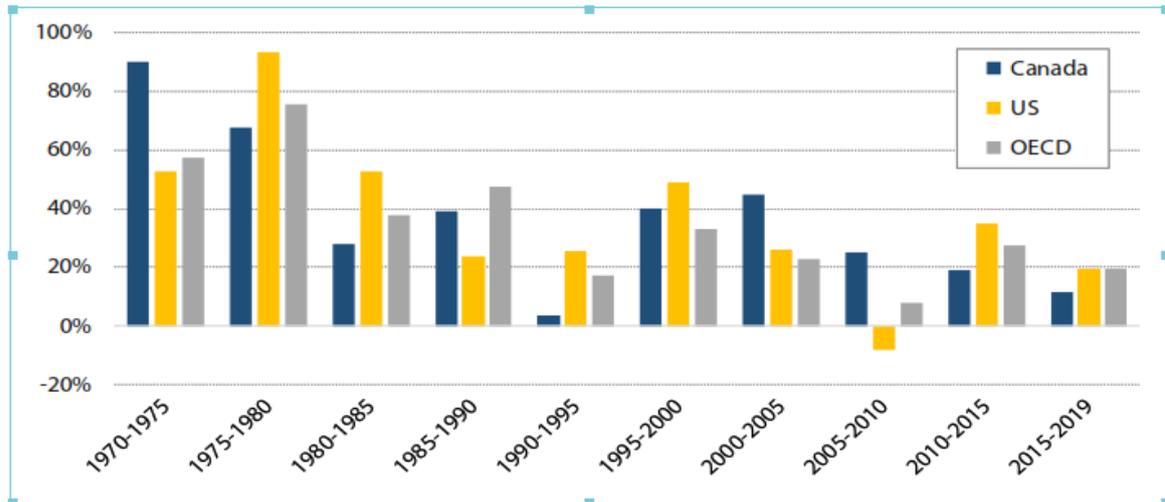
Berbeda kondisinya ketika krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya tekanan fiskal, keputusan keberlanjutan penganggaran modal menjadi terganggu karena terbatas sumber daya yang dimiliki. Akibatnya, negara-negara yang menghadapi *fiscal stress* sering kali terpaksa mengurangi atau menunda investasi publik (Tandberg & Allen, 2020) dalam perencanaan belanja modal. Dengan demikian, pemerintah lokal mesti menemukan cara yang terbaik untuk menyeimbangkan anggaran dalam kendala politik dan ekonomi tersebut (Cope, 1992). Biasanya pemerintah kota memilih untuk mempertahankan atau minimal mengurangi tingkat pemberian layanan selama krisis ekonomi, yang sering kali berarti menunda investasi infrastruktur atau setidaknya mengurangi tingkat belanja modal (Pagano, 2002).

The National Income and Product Accounts (NIPA) yang dikelola oleh Biro Analisis Ekonomi (BEA) memberikan indikator yang lebih tepat untuk pengeluaran modal negara bagian dan lokal agregat. NIPA melaporkan bahwa pengurangan belanja modal di tengah-tengah resesi hebat jauh lebih besar daripada pengurangan selama resesi terakhir pada tahun 2001–2002. Mulai tahun 2003—tahun pertama setelah resesi 2001–2002—nilai total aset tetap negara bagian dan lokal meningkat di semua bidang program, dengan peningkatan paling pesat terjadi pada jalan raya dan pendidikan. Pada tahun 2008 pertumbuhan tersebut melambat, dan total stok di beberapa daerah kemudian menurun pada tahun 2009 (Marlowe, 2012). Kemudian laporan NASBO 1999 tentang "Penganggaran modal di negara bagian" menunjukkan bahwa delapan negara bagian tidak menggunakan anggaran modal: Alabama, Arkansas, Indiana, Nevada, Carolina Selatan, Dakota Selatan, Texas, Virginia Barat, dan Wyoming. Hal ini terjadi karena resesi ekonomi yang berdampak langsung pada negara tersebut (Ermasova, 2013).

Globerman & Press, (2018) mendokumentasikan penurunan pertumbuhan total belanja modal tetap di Kanada setelah tahun 2014. Penurunan tersebut konsisten dengan pertumbuhan

ekonomi dan investasi di Kanada yang lebih lambat dibandingkan dengan negara lain ketika diukur dengan *gross fixed capital formation* (GFCF), seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Change in Gross Fixed Capital Formation (GFCF)



Sumber: An International Comparison of Capital Expenditure (Globerman & Emes, 2021)

Berdasarkan Gambar 1 memberikan gambaran umum tentang perubahan *gross fixed capital formation* (GFCF) di Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara OECD lainnya dari tahun 1970 hingga 2019. Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara OECD lainnya secara keseluruhan mengalami pertumbuhan tercepat dalam GFCF selama periode 1970 hingga 1980. Kemudian antara tahun 1970 dan 2010, Kanada mengalami tingkat pertumbuhan GFCF yang lebih cepat daripada AS dan OECD, sementara di lain waktu Kanada menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat. Namun, dari 2010 hingga 2019, GFCF di Kanada mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada di AS dan negara-negara OECD lainnya.

Sementara itu, (Srithongrung, (2017) menyarankan bahwa perencanaan dan manajemen modal jangka panjang dapat membantu untuk mengimbangi efek ketidakpastian yang tidak diinginkan seperti tekanan fiskal, keputusan politik, dan kekurangan pendapatan yang tidak terduga karena resesi hebat (Marlowe, 2013; Ermasova, 2013) yang dihadapi

oleh pemerintah. Resesi ini telah menempatkan tekanan fiskal pada kemampuan negara bagian untuk membiayai proyek-proyek modal (Ermasova, 2013). Lebih lanjut Pagano (2002) berpendapat bahwa resesi sangat berbahaya bagi perencanaan belanja modal karena pendapatan sumber sendiri (PAD) menurun, karena kota berusaha mempertahankan layanan. Di samping itu juga bantuan negara untuk kotamadya sering menurun selama resesi; dan penerbitan utang sering kali menurun sebagai respons terhadap penurunan peringkat obligasi.

Studi lainnya tentang penganggaran modal berkaitan dengan teknik penganggaran modal (Chan, 2004), dan pengaturan kelembagaan untuk penganggaran modal di pemerintah daerah (Srithongrung, 2010). Studi Chan (2004) mengambil sampel Pemerintah Kota Kanada yang telah menggunakan beberapa bentuk teknik penganggaran modal. Hasil temuannya menunjukkan bahwa mayoritas bergantung pada periode pengembalian modal sementara 40 persen menggunakan analisis arus kas

yang didiskontokan sebagai kriteria evaluasi utama untuk keputusan investasi modal. Srithongrung (2010) melakukan studi mengenai pengaturan kelembagaan untuk penganggaran modal. Ada dua karakteristik kelembagaan: persyaratan undang-undang (misalnya, aturan pembatasan utang, proses anggaran, dan tindakan obligasi) dan praktik manajemen lokal. Hasil temuan Srithongrung (2010) menunjukkan bahwa penganggaran modal di negara bagian Illinois dipengaruhi oleh undang-undang utama yang menentukan apakah itu proyek modal, dan bagaimana konstituen utama berinteraksi dalam proses proyek modal.

Studi tentang keberlanjutan penganggaran modal telah dilakukan oleh (Frost & Rooney, 2021) yang memeriksa tentang aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh manajer dalam cara menangani keberlanjutan pengambilan keputusan penganggaran modal. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa untuk keputusan infrastruktur publik ini bergantung pada peran pelanggan sebagai konsumen dan warga negara, keputusan mereka dipandang sebagai pertimbangan penting untuk keberlanjutan dalam keputusan anggaran modal. Namun, beberapa studi yang lain memeriksa tentang praktik penganggaran modal di sektor pemerintahan masih cenderung deskriptif (Doss, 1987; (Ekstrom, 1989) Ekstrom, 1989; Forrester, 1993). Doss, (1987) mengidentifikasi praktik penganggaran modal kota melalui survei nasionalnya bahwa lebih dari separuh kota memiliki anggaran modal yang terpisah. Dia menemukan bahwa keberadaan anggaran modal yang terpisah berhubungan positif dengan ukuran kota dan dewan pengelola kota, tetapi sedikit berkorelasi dengan perubahan populasi. Ekstrom, (1989) menyelidiki praktik anggaran pemerintah daerah di negara bagian New York. Dia menemukan bahwa 41,8% dari kabupaten menggunakan anggaran modal yang

terpisah dan keberadaannya terkait dengan pengalaman pendidikan penyusun. Forrester (1993) mengeksplorasi praktik penganggaran modal di pemerintah kota dengan populasi 75.000 atau lebih. Dia menemukan bahwa 81,1% kota menggunakan anggaran modal, dan 71% di antaranya menggunakan anggaran modal terpisah.

Sementara itu, literatur yang membahas respons pemerintah tentang penganggaran modal dalam situasi *fiscal stress* masih sedikit berdasarkan hasil observasi pada jurnal internasional bereputasi (Pagano, 1988; Hoffmann et al., 2000; Jimenez, 2009; Ermasova, 2013; Ho, 2008; Marlowe, 2013; Warner et al., 2020; Srithongrung, 2017). Hal ini konsisten dengan Ermasova (2013) yang mengatakan bahwa krisis fiskal dan infrastruktur yang runtuh adalah masalah utama yang dihadapi pemerintah negara bagian dan literatur yang meneliti bagaimana negara mengatasi tantangan dan tekanan modal ini selama penurunan ekonomi masih sedikit. Reviu terkait tren penelitian penganggaran modal dengan metode *systematic review* telah dilakukan oleh (Michelon, et al., 2020). Namun, tinjauan literatur yang menghubungkan antara penganggaran modal dan *fiscal stress* masih belum ada. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan tinjauan secara komprehensif mengenai perkembangan riset penganggaran modal dalam situasi pemerintah menghadapi *fiscal stress*. Tujuan dari penelitian adalah untuk memetakan tren publikasi ilmiah dan jenis penelitian yang paling menonjol, serta mensintesis hasil-hasil penelitian tentang hubungan praktik penganggaran modal dan *fiscal stress* di sektor pemerintahan.

Penganggaran Modal

Literatur penganggaran modal memberikan argumen persuasif pentingnya perencanaan modal dalam mengalokasikan sumber daya yang

langka menuju akuisisi dan pemeliharaan fasilitas modal (Pagano, 1988); Pagano, 1984) (Pagano, 1984) serta dalam mengelola utang yang terkait dengan investasi modal (Forrester, 1993). Penganggaran modal adalah instrumen perencanaan yang membantu dalam alokasi sumber daya keuangan yang benar di antara proyek-proyek investasi, dengan maksud untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Penganggaran modal dapat juga membantu dalam mengukur kelayakan proyek (Sureka, et al., 2022). Dengan demikian penganggaran modal terbukti menjadi komponen penting untuk menilai kondisi keuangan pemerintah dan sering digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. Di samping itu, Marlowe (2012) menyatakan bahwa anggaran modal mengacu pada sumber dan penggunaan untuk barang modal, yang biasanya didefinisikan sebagai pengeluaran untuk pembangunan fasilitas, pembelian tanah dan jalan yang baik, serta akuisisi peralatan yang memiliki umur ekonomis yang akan melampaui periode fiskal saat ini.

Tentu saja organisasi yang berbeda menggunakan pengambil keputusan yang berbeda untuk mengadopsi keputusan terkait dengan penganggaran modal (Brijlal & Quesada, 2009). Pertama, keputusan penanaman modal secara signifikan memengaruhi tingkat pertumbuhan organisasi; membuat keputusan yang salah dapat merusak organisasi. Kedua, keputusan seperti itu membutuhkan dana dalam jumlah besar. Menurut Arnold & Hatzopoulos, (2000) menilai proposal penganggaran modal adalah bagian dari keputusan untuk melakukan investasi. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan penanaman modal merupakan hal yang mendasar bagi kelangsungan dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang (Bennouna, et al., 2010).

Fiscal Stress dan Pengukurannya

Fiscal stress secara luas diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kewajiban di masa sekarang dan masa yang akan datang (Afonso, et al., 2018; Chaney, et al., 2002; Baldacci, et al., 2011; Rivenbark, et al., 2010). Kloha, et al., (2005) beranggapan bahwa *fiscal stress* adalah kegagalan untuk mencukupi ukuran di bidang posisi operasi, utang, dan kebutuhan masyarakat serta sumber daya keuangan selama beberapa secara beruntun. Tinjauan literatur Boyne (1998) menemukan bahwa tiga ukuran tekanan fiskal biasanya digunakan: (a) beban pajak—rasio pajak terhadap pendapatan, (b) batasan pajak—setiap batasan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, dan (c) hibah—bagian pendanaan yang disediakan oleh sumber-sumber antarpemerintah. Dalam tinjauan Bel & Fageda (2007), tiga ukuran serupa dicatat: beban pajak, batasan hukum pada tingkat pajak daerah, dan besarnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Hanya saja *fiscal stress* bagi pemerintah daerah dapat menantang administrator publik dan berdampak secara langsung pada tingkat barang dan jasa publik dalam komunitas lokal. Di samping itu juga, *fiscal stress* dapat diakibatkan oleh berbagai sumber termasuk manajemen yang buruk, kerugian investasi, litigasi, bencana alam, dan meningkatnya biaya tunjangan bagi pegawai publik. Stres fiskal juga dapat terjadi ketika lebih sedikit sumber daya federal dan negara bagian yang masuk ke pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, tujuan pemerintah daerah adalah menyeimbangkan anggaran operasional tahunan sambil menyediakan barang dan jasa publik kepada penduduk yang dapat diukur melalui kesenjangan fiskal. Tanggung jawab fiskal diperlukan untuk memilih tingkat pengeluaran yang memenuhi kebutuhan dan tujuan saat ini dan di masa depan (MacKay, 2017).

Dalam kasus ekstrem, tekanan fiskal dapat menyebabkan masalah likuiditas dan solvabilitas yang mengakibatkan krisis fiskal. Isu-isu ini dapat memiliki dampak negatif langsung terhadap kesanggupan pemerintah lokal untuk mengadakan barang dan jasa publik di dalam komunitas mereka. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya, pemerintah daerah dapat menaikkan pajak, menarik dari kas dan cadangan sekuritas, atau mengeluarkan utang. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik juga dapat dikurangi—yang dapat mencakup lebih sedikit layanan yang disediakan selama periode saat ini atau penundaan investasi dalam infrastruktur yang memengaruhi periode mendatang. Pemerintah mungkin juga berusaha untuk membayar pegawai publik lebih sedikit, mengurangi tunjangan mereka, atau menunda pembayaran pensiun publik melalui penggunaan kewajiban pensiun yang tidak didanai. Dalam mengurangi manfaat bersih bagi penduduk mungkin diperlukan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kendala anggaran, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap preferensi untuk tinggal di komunitas tersebut. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal dapat dibatasi oleh kemampuan penduduk untuk pindah ke komunitas lain (MacKay, 2017).

Hubungan *Fiscal Stress* dan Penganggaran Modal

Pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal setelah bertahun-tahun, harus menemukan cara untuk menyeimbangkan anggaran dalam kendala politik dan ekonomi tersebut (Cope, 1992). Pemerintah kota biasanya memilih untuk mempertahankan atau minimal mengurangi tingkat pemberian layanan selama krisis ekonomi, yang sering kali berarti menunda investasi infrastruktur atau setidaknya mengurangi tingkat belanja

modal (Pagano, 2002). Penelitian Poterba, (1994) berfokus pada krisis fiskal di negara bagian pada awal 1990-an dengan memeriksa tanggapan negara dan pengaruh variabel institusional dan politik terhadap reaksi negara bagian. Penelitiannya didasarkan pada data aktual National Association of State Budget Officers (NASBO) tentang pengeluaran dan pajak sebagai reaksi terhadap tekanan fiskal selama periode 1988-1992. Hasil penelitiannya secara umum menunjukkan negara dapat merespons guncangan fiskal dengan memotong pengeluaran atau menaikkan pajak. Poterba menyatakan bahwa 60 persen negara bagian memotong anggaran mereka setelah diberlakukan sebagai tanggapan terhadap guncangan fiskal, tetapi lebih banyak negara bagian yang memberlakukan kenaikan pajak agar berlaku pada tahun fiskal berikutnya daripada mengubah undang-undang pajak mereka pada tahun berjalan (Poterba, 1994). Negara sering kali memaksakan penghematan tambahan dan tekanan fiskal di tingkat lokal ketika menghadapi kesulitan fiskal (Mullins & Pagano, 2005).

McGranahan, (2002) menjelaskan bagaimana negara-negara bagian bereaksi terhadap penurunan sebelumnya (yaitu, resesi awal 1990-an) dan secara umum bagaimana negara-negara bagian bereaksi sejauh ini terhadap resesi saat ini. Pada awal resesi 1990-an, negara-negara bagian secara dramatis memotong layanan, memberlakukan kenaikan pajak yang besar, dan menurunkan saldo cadangan. Dia memperkirakan bahwa jika perilaku negara bagian selama penurunan saat ini konsisten dengan selama awal tahun 1990-an resesi, negara bagian akan mulai menarik saldo mereka, memotong anggaran dan kemudian maju untuk memotong pengeluaran secara lebih dramatis dan meningkatkan pajak.

Studi Jimenez (2009) mengkaji hubungan tekanan fiskal antara negara bagian dan pemerintah daerah. Secara

khusus, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana tekanan fiskal tingkat negara bagian membentuk alokasi tanggung jawab pengeluaran antara sektor negara bagian dan lokal. Dalam hal kategori pengeluaran fungsional, Pemerintah negara bagian mengurangi alokasi pengeluaran pembangunan dan keamanan publik karena menyesuaikan diri dengan keterbatasan fiskal. Akan tetapi, tingkat kondisi fiskal negara bagian tidak memengaruhi secara sistemik pada peran negara bagian dalam mendistribusikan kembali pengeluaran dan pembiayaan pendidikan. Studi tentang keberlanjutan penganggaran modal telah dilakukan oleh Frost & Rooney (2021) menguji tentang aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh manajer dalam cara menangani keberlanjutan pengambilan keputusan penganggaran modal. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa untuk keputusan infrastruktur publik ini bergantung pada peran pelanggan sebagai konsumen dan warga negara, keputusan mereka dipandang sebagai pertimbangan penting untuk keberlanjutan dalam keputusan anggaran modal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *systematic literature review* dengan langkah-langkah yang sistematis berbasis pada bukti kajian pustaka dari teori dan hasil-hasil penelitian yang telah ada. Untuk melakukan tinjauan pustaka yang sistematis, penting untuk membatasi area penelitian dan menetapkan protokol untuk mengidentifikasi, memilih, meninjau, dan mensintesis literatur (Seuring & Müller, 2008). Artikel ini mengikuti lima langkah berikut untuk tinjauan literatur sistematis (Denyer & Tranfield, 2009):

- 1) perumusan pertanyaan penelitian;
- 2) identifikasi studi;
- 3) seleksi dan evaluasi studi;
- 4) analisis dan sintesis; dan
- 5) presentasi hasil.

Rumusan Pertanyaan Penelitian

Seuring & Müller (2008) mengatakan bahwa langkah pertama dalam tinjauan pustaka sistematis adalah menentukan pertanyaan penelitian, yaitu mengidentifikasi pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian. Adapun pertanyaan penelitian yang telah ditentukan untuk tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Bagaimana tren publikasi penelitian tentang hubungan praktik penganggaran modal dan *fiscal stress* di sektor pemerintahan?
- 2) Apa jenis penelitian yang paling menonjol tentang hubungan praktik penganggaran modal dan *fiscal stress* di sektor pemerintahan?
- 3) Bagaimana perkembangan hasil penelitian tentang hubungan praktik penganggaran modal dan *fiscal stress* di sektor pemerintahan?

Identifikasi Studi

Langkah ini melibatkan mencari dan menemukan studi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Filter yang digunakan dalam proses identifikasi artikel ditentukan sehingga kata kunci penelitian harus muncul dalam judul artikel, abstrak atau kata kunci. Dalam hal ini, pencarian dilakukan dengan menggunakan *publish or perish* pada jurnal internasional bereputasi (Scopus). Ada pun kata kunci yang digunakan dalam pencarian yaitu *capital budgeting*, *capital project*, dan *capital investment*. Pencarian kata kunci ini dimulai dari tahun 1970-2020.

Seleksi dan Evaluasi Studi

Setelah fase pencarian pertama, abstrak, metodologi, hasil utama, dan kesimpulan dari artikel yang diidentifikasi diperiksa dengan cermat untuk menentukan apakah relevan dengan pertanyaan penelitian. Kriteria inklusi yang digunakan untuk pemilihan artikel antara lain penelitian dipublikasikan pada jurnal bereputasi (Scopus) yang mencakup artikel ilmiah

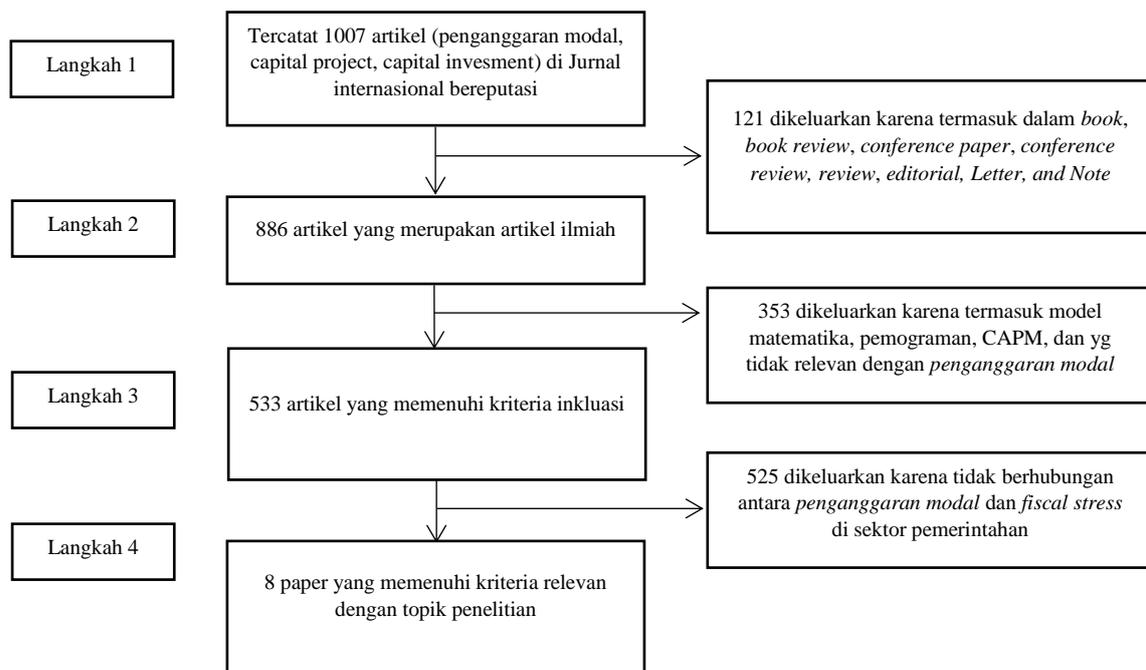
yang ditulis dalam bahasa Inggris dan mengeluarkan artikel yang *book*, *book review*, *conference paper*, *conference review*, *review*, *editorial*, *letter*, dan *note*. Artikel harus diterbitkan dalam jurnal dengan indeks dampak (JCR atau SJR). Artikel dalam kriteria seperti menjamin bahwa proses pemilihan artikel sesuai dengan seperangkat standar yang menjamin kualitas penelitian utama, ini menjadi kriteria yang digunakan dalam *systematic literature review* (Schmeisser, 2013; Vural, 2017; Martinelli & Tunisini, 2019). Kriteria eksklusi yang lain juga diterapkan untuk memilih artikel yang konsisten dengan penelitian ini yaitu artikel yang berkaitan model matematika, pemograman, CAPM, dan yang tidak

relevan dengan penganggaran modal dikeluarkan dari analisis ini.

Analisis dan Sintesis

Pada langkah keempat, terdapat 8 artikel yang dipilih dan dievaluasi pada tahap sebelumnya untuk dianalisis dan disintesis. Oleh karena itu, setiap artikel yang dipilih telah dibaca secara rinci. Pada tahap ini diterapkan juga kriteria eksklusi yaitu artikel yang hasil penelitian tidak relevan antara hubungan penganggaran modal dan *fiscal stress* di sektor pemerintahan dikeluarkan dalam analisis *systematic literature review*. Hasil dari proses ini disajikan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Tahapan Systematic Literature Review

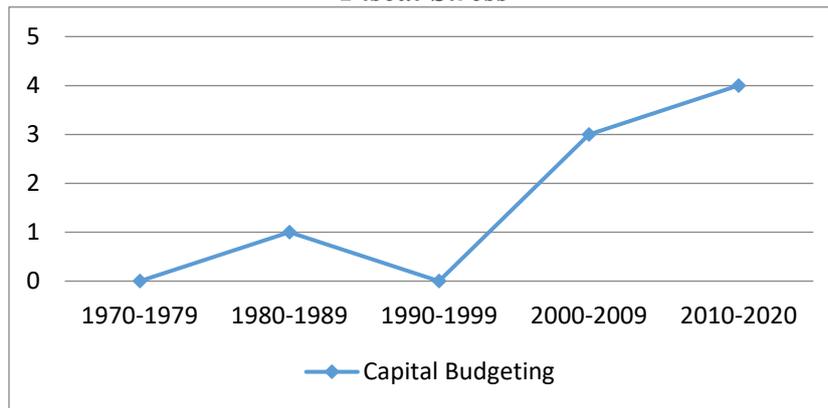


Hasil dan Pembahasan

Pada bagian hasil dan pembahasan ini diuraikan hasil analisis sintesis artikel yang direviu, dan disajikan dalam deskripsi statistik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian prosedur *systematic literature review*. Pendekatan kronologis digunakan untuk menjawab

pertanyaan penelitian yang pertama (RQ1), dengan mengklasifikasikan artikel yang dipilih berdasarkan tahun publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Adapun hasil perkembangan tren penelitian tentang hubungan penganggaran modal dan *fiscal stress* di sektor pemerintahan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Tren Publikasi Penelitian Hubungan antara Penganggaran Modal dan Fiscal Stress



Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa penelitian awal tentang hubungan penganggaran modal dan *fiscal stress* mulai dilakukan pada periode waktu tahun 1980-1989. Hal ini cukup beralasan karena beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengalami resesi hebat yang berakibat pada terjadinya penurunan pendapatan lokal. Sementara itu, bantuan dari pusat pun semakin berkurang. Kemudian penelitian tentang topik ini semakin meningkat di periode tahun 2000-2020. Peningkatan ini seiring dengan minat dan ketertarikan peneliti yang dikarenakan masih sedikitnya penelitian yang memeriksa tentang hubungan penganggaran modal dan tekanan fiskal. Hal ini konsisten dengan (Ermasova, 2013) yang mengatakan bahwa krisis fiskal dan infrastruktur yang

runtuh adalah masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah negara bagian, dan ada kekurangan literatur yang meneliti bagaimana negara mengatasi tantangan dan tekanan modal ini selama penurunan ekonomi.

Sedangkan, jenis penelitian yang paling mendominasi adalah kuantitatif (63%), sisanya 37% merupakan studi kualitatif (Tabel 1). Penelitian kuantitatif lebih sering digunakan karena peneliti menghubungkan penganggaran modal dengan berbagai variabel yang memengaruhinya. Dengan demikian, untuk penelitian di masa depan dapat menggunakan studi kualitatif atau kombinasi dari keduanya (*mixed method*), karena penggunaan metode penelitian bergantung pada pertanyaan dan tujuan penelitian.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Penelitian

Nama Jurnal	Penulis	Jenis Penelitian	
		Kuantitatif	Kualitatif
Urban Affairs Quarterly	(Pagano, 1988)	1	-
Public Budgeting and Finance	(Hoffmann et al., 2000); (Srithongrung, 2017)	1	1
State and Local Government Review	(Jimenez, 2009); (Ermasova, 2013)	1	1
International Journal of Public Administration	(Ho, 2008)	1	
Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management	(Marlowe, 2013)		1
Public Administration Review	(Warner et al., 2020)	1	
	Jumlah	5	3
	Persentase	63%	37%

Adapun perkembangan hasil penelitian tentang hubungan antara penganggaran modal dan *fiscal stress* di sektor pemerintahan masih memberikan respon yang berbeda-beda di antara para peneliti (Pagano, 1988); (Hoffmann, et al., 2000); (Jimenez, 2009); (Ermasova, 2013); (Ho, 2008); (Marlowe, 2013); (Warner, et al., 2020); (Srithongrung, 2017). (Pagano, 1988) Pagano (1988) menganalisis respons gangguan fiskal kota yang tercermin dalam anggaran modal dan upaya untuk mempertahankan belanja modal, dengan menggunakan survei opini dan keuangan terhadap petugas anggaran pada 234 kota di Amerika Serikat pada tahun 1986. Pagano (1988) menemukan bahwa kota menyesuaikan diri dengan tekanan fiskal melalui alat pendapatan (misalnya, biaya pengguna dan penilaian khusus) dan alat pengeluaran (misalnya, berbagi biaya dengan pemerintah negara bagian atau lokal lainnya). Pagano (1988) menyimpulkan bahwa pendapatan lokal dan dana obligasi akan lebih diandalkan saat pemotongan bantuan federal berlanjut. Sementara itu, pergeseran biaya tampaknya menjadi kebijakan yang harus diadopsi oleh kota dalam situasi yang fiskal yang memburuk. Meskipun kota-kota tampaknya lebih memilih untuk tetap membiayai proyek-proyek yang telah mereka biayai secara historis, akan tetapi gangguan—seperti *fiscal stress* atau pemotongan bantuan federal—pada akhirnya menghasilkan lebih sedikit dolar yang tersedia untuk tujuan modal, dan pada gilirannya, ini memaksa kota-kota untuk mempertimbangkan pergeseran biaya sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dengan lingkungan eksternal. Jika gangguan terus berlanjut, seperti pemotongan terhadap bantuan federal untuk pemerintah daerah, pergeseran biaya akan terus menjadi agenda fiskal bagi kota yang memiliki tekanan fiskal yang tinggi.

Hoffmann et al., (2000) meneliti tentang bagaimana penganggaran modal

membantu kota yang sakit (Kota Cleveland, Amerika Serikat) dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuannya menunjukkan bahwa kegagalan kota dalam kewajiban fiskalnya pada tahun 1978 tampaknya membatasi masalah infrastruktur kota; tidak ada strategi komprehensif untuk belanja modal di kota yang bangkrut, dan tidak ada uang untuk dibelanjakan dalam hal apa pun. Namun, selama tahun 1980-an, dengan dukungan dari administrasi, komunitas bisnis, dan inovasi dari sekelompok kecil perencana kota yang berdedikasi, pemerintah daerah merestrukturisasi ratusan juta penganggaran modal secara sistematis diinvestasikan dalam infrastruktur publik.

Studi Jimenez (2009) mengkaji hubungan *fiscal stress* antara negara bagian dan pemerintah lokal di Amerika Serikat, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel. Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana *fiscal stress* di tingkat negara bagian membentuk alokasi tanggung jawab pengeluaran antara sektor negara bagian dan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda koefisien dari keempat indikator kondisi fiskal menunjukkan adanya pengurangan tanggung jawab belanja negara sebagai akibat dari tekanan fiskal negara. Dalam hal kategori pengeluaran fungsional, negara bagian mengurangi alokasi pengeluaran pembangunan dan keamanan publik, karena menyesuaikan diri dengan keterbatasan fiskal. Tetapi, tingkat kondisi fiskal negara bagian tidak memengaruhi secara sistematis pada peran negara bagian dalam mendistribusikan kembali pengeluaran dan pembiayaan di sektor pendidikan. Temuan yang menarik lainnya dari studi Jimenez (2009) adalah model organisasi slack fiskal yang menegaskan bahwa pengeluaran pembangunan merupakan sumber penting dari slack bagi pemerintah negara bagian. Namun,

memperlakukan pengeluaran pembangunan padat modal sebagai sumber kelonggaran melibatkan pengorbanan yang signifikan. Yang paling utama adalah bahwa investasi yang ditangguhkan, khususnya untuk pemeliharaan, memperburuk kondisi infrastruktur yang buruk di negara bagian. Investasi infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat potensi pembangunan ekonomi suatu negara.

Ermaso (2013) meneliti persamaan dan perbedaan praktik penganggaran modal di 40 negara bagian Amerika Serikat setelah resesi dengan menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif). Setelah resesi, negara bagian mengalami penurunan ekonomi yang berdampak langsung pada perubahan anggaran modal digunakan karena sumber daya fiskal diawasi dengan lebih ketat selama penurunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara bagian menggunakan penganggaran modal secara berbeda, tetapi ada kesamaan dalam pendekatan yang menghasilkan tiga kategori utama yang dijelaskan oleh praktik di pemerintah negara bagian tertentu: (1) penganggaran modal sebagai bagian dari operasi; (2) penganggaran modal sebagai perencanaan modal tahun jamak; dan (3) penganggaran modal sebagai manajemen modal strategis. Pada kategori pertama, penganggaran modal ditemukan di beberapa negara bagian di seluruh Amerika Serikat tidak menggunakan proses anggaran yang terpisah. Penganggaran modal dalam kategori yang kedua terjadi terutama dalam proses perencanaan modal tahun jamak dan keputusan belanja modal didasarkan pada perspektif anggaran jangka menengah. Pada kategori yang kedua ini ditemukan bahwa negara-negara yang melaporkan jenis penganggaran ini berusaha untuk mendapatkan kontrol terbaik atas dampak belanja modal dan biaya yang terkait pada anggaran operasional. Negara menggunakan perencanaan modal multi-

year dan peramalan keuangan untuk negara. Selanjutnya pada kategori yang ketiga, praktik penganggaran modal mencerminkan upaya negara untuk tidak hanya mengontrol dampak belanja modal pada operasi tetapi juga terlibat dalam manajemen modal strategis dan memastikan penggunaan dan harga terbaik untuk pengeluaran modal melalui pengendalian biaya modal terkait dan memastikan pemeriksaan, perencanaan, tindak lanjut, dan umpan balik proyek modal. Negara-negara dalam kategori ini meningkatkan proses anggaran modal melalui spesialisasi: mereka menggunakan proses penganggaran modal terpisah yang biasanya mencakup dewan negara atau komite penasihat yang menyerahkan rekomendasi dan prioritas pengembangan modalnya kepada badan legislatif untuk persetujuan dan prioritas anggaran terpisah.

Ho (2008) menganalisis perubahan belanja modal jalan raya pemerintah negara bagian AS antara tahun 1988 dan 2000 menggunakan analisis kuantitatif. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja modal sangat sensitif terhadap ledakan dan kehancuran ekonomi. Belanja modal menurun selama kemerosotan ekonomi dan tumbuh dalam kemajuan ekonomi. Namun, temuan lainnya gagal memberikan dukungan tentang hubungan asimetris antara belanja modal dan siklus ekonomi, karena negara bagian tidak memotong belanja modal jalan raya secara dramatis bahkan ketika pertumbuhan ekonomi mereka negatif. Ho (2008) mengatakan ketika transfer federal memiliki dampak yang terbatas pada belanja modal jalan raya negara bagian, keputusan negara bagian untuk mempertahankan investasi di modal jalan raya adalah pilihan politik sukarela. Mekanisme kelembagaan yang berbeda yang digunakan oleh pemerintah negara bagian, seperti proses perencanaan dan penganggaran modal, pendapatan yang dialokasikan dan dana cadangan khusus untuk proyek-proyek modal, dan strategi

pembiayaan utang tampaknya merupakan strategi yang berhasil untuk melindungi belanja modal.

Marlowe (2013) memeriksa tiga kasus di mana pemerintah daerah mengubah keputusan mereka untuk memilih proyek modal. Studi ini mengambil sampel pada 3 yurisdiksi kota yang mengalami resesi hebat di Amerika Serikat yaitu: City of Tracy, Kota Louisburg, dan Kota Richland. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas modal secara strategis, tetapi proses pelaksanaan reformasi tersebut harus dapat disesuaikan dengan perubahan politik. Temuan dari kasus-kasus ini menyarankan tiga pelajaran utama. Pertama, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas belanja modal dengan cara yang lebih strategis. Kedua, reformasi bekerja jika yurisdiksi beradaptasi dengan keadaan politik yang berlaku. Dalam sebagian besar kasus yang disajikan di sini, reformasi awal menjadi sesuatu yang sangat berbeda tetapi lebih cocok secara politis dari waktu ke waktu. Dan ketiga, keberhasilan awal reformasi ini bergantung pada informalitas. Ketiga yurisdiksi mengubah bagian utama dari perencanaan peningkatan modal mereka, tetapi tidak secara resmi mengakui perubahan tersebut dalam proses seleksi, kriteria seleksi, atau komponen dari proses penganggaran modal formal mereka.

Warner et al., (2020) meneliti tentang tanggapan pemerintah daerah terhadap tekanan fiskal. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tanggapan terhadap stres tidak disebabkan oleh kemiskinan, namun tempat-tempat dengan infrastruktur yang lebih tua melakukan lebih sedikit penundaan, karena penundaan akan memperburuk masalah infrastruktur yang menua. Oleh karena itu, pemerintah daerah menyadari bahwa pemeliharaan dan proyek modal sangat penting untuk masa depan daerah. Srithongrungrung (2017) memperluas literatur

dengan memeriksa efek perencanaan modal jangka panjang dan praktik manajemen pada 48 pemerintah negara bagian di Amerika Serikat selama periode 24 tahun dari 1988 hingga 2012 menggunakan data panel dalam model analisis data. Hasil studi Srithongrungrung (2017) menunjukkan pengaruh perencanaan dan pengelolaan modal jangka panjang sangat signifikan jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain penyebab volatilitas anggaran seperti kondisi makroekonomi, ketersediaan pendapatan, dan keputusan legislatif.

Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa tekanan fiskal, yang diukur melalui variabel *shocks revenue*, tampaknya menambah volatilitas pada belanja modal negara, meskipun pengaruhnya tidak relatif besar (koefisiennya sama dengan 0,06) tetapi signifikan secara statistik pada level 0,01. Hal ini menegaskan bahwa tekanan fiskal dapat menambah volatilitas pada pengeluaran modal negara. Oleh karena itu, Srithongrungrung (2017) menyarankan bahwa perencanaan dan manajemen modal jangka panjang dapat membantu untuk mengimbangi efek ketidakpastian yang tidak diinginkan seperti tekanan fiskal, keputusan politik, dan kekurangan pendapatan yang tidak terduga. Kemudian Frost & Rooney (2021) berpendapat bahwa perlu untuk memasukkan pengetahuan nonkeuangan dan kriteria evaluasi ke dalam proses penganggaran modal untuk mempertimbangkan keberlanjutan. Selain itu juga, keberlanjutan dalam keputusan penganggaran modal dapat diidentifikasi dari peran kunci kepemimpinan strategis dan norma-norma organisasi yang terkait dengan keberlanjutan, serta perbedaan persepsi individu tentang dimasukkannya pertimbangan keberlanjutan dalam keputusan penganggaran modal. Di hadapan kebutuhan keuangan substantif, faktor-faktor ini memiliki efek substantif pada upaya organisasi untuk mengukur dan 'meningkatkan' dampak

keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan anggaran modal.

Untuk melihat *mind mapping* konektivitas hasil temuan penelitian dari 8 artikel yang telah dipilih, maka kami menggunakan aplikasi Vosviewer dengan

memilih *co occurrence map based on text data* pada judul dan abstrak dengan metode penghitungan penuh (*full counting*). Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Mindmap konektivitas Riset Terdahulu



Dari Gambar 4 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pemetaan riset terdahulu tentang tekanan fiskal dan keberlanjutan penganggaran modal diklasifikasikan menjadi 2(dua) klaster yaitu:

- Klaster 1 warna merah yang terdiri dari *great recession*, *capital budgeting* (penganggaran modal), *external environment* (lingkungan eksternal), dan *capital spending* (belanja modal).
- Klaster 2 warna hijau yang terdiri dari *fiscal stress* (tekanan fiskal), *local government* (pemerintah daerah), *cooperation* (perusahaan), dan *privatization* (privatisasi).

Adapun konektivitasnya dapat dilihat berdasarkan garis yang menghubungkan di antara kedua klaster tersebut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tekanan fiskal memiliki hubungan dengan penganggaran modal dan belanja modal. Penganggaran modal yang dimediasi oleh lingkungan eksternal berdampak pada belanja modal. Sementara itu resesi hebat dapat berdampak pada penganggaran modal, lingkungan eksternal dan juga belanja

modal. Sedangkan tekanan fiskal memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah, perusahaan dan privatisasi.

Kesimpulan

Penganggaran modal merupakan mekanisme perencanaan yang berguna dalam memilih beberapa alternatif dalam mengalokasikan sumber daya dalam proyek investasi publik. Namun, penganggaran modal akan menghadapi masalah pada saat pemerintah mengalami *fiscal stress* yang semakin memburuk sebagai akibat dari krisis atau resesi ekonomi. Selama ini, literatur yang meneliti secara komprehensif tentang dampak *fiscal stress* terhadap keberlanjutan penganggaran masih kurang. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian secara komprehensif dengan meninjau dan menganalisis hasil-hasil penelitian dalam topik keberlanjutan penganggaran modal yang dipengaruhi oleh *fiscal stress*. *Systematic literature review* telah dipilih sebagai metode untuk memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada tahapan *systematic literature review*. Pencarian secara komprehensif dengan

menggunakan kata kunci *capital budgeting*, *capital project*, dan *capital investment* pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan analisis dan pemetaan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Adanya pemetaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagi peneliti mengenai kesenjangan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Hasil studi ini dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi untuk menghadirkan tema riset yang berkaitan dengan *fiscal stress* dan keberlanjutan penganggaran modal yang masih jarang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: pertama, penelitian awal tentang hubungan *capital* antara *budgeting* dan *fiscal stress* mulai dilakukan pada periode waktu tahun 1980-1989. Kemudian, penelitian tentang topik ini semakin meningkat di periode tahun 2000-2020. Kedua, jenis penelitian yang paling mendominasi adalah kuantitatif (63%). Sedangkan sisanya 37% merupakan studi kualitatif. Ketiga, perkembangan hasil penelitian tentang hubungan antara penganggaran modal dan tekanan fiskal di sektor pemerintahan masih memberikan respon yang berbeda-beda di antara para peneliti. Di samping itu, Penelitian ini dapat juga berkontribusi dalam memberikan tinjauan secara komprehensif mengenai perkembangan riset *capital* dalam situasi pemerintah menghadapi *fiscal stress*, sehingga bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan penganggaran modal. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, karena belum memetakan konektivitas *co-authorship* dari 8 artikel yang dipilih, dan juga belum memetakan peluang riset di masa depan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya berpeluang menggunakan *meta-analysis* untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan pemetaan topik riset untuk di masa depan. Di samping itu

dapat juga mengeksplorasi kecenderungan kolaborasi peneliti di institusi yang berbeda sehingga memiliki peluang dalam pengembangan teori.

Daftar Pustaka

- Afonso, A., Baxa, J., & Slavík, M. (2018). Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis. *Empirical Economics*, 54(2), 395–423. doi: <https://doi.org/10.1007/s00181-016-1210-5>
- Al-Mutairi, A., Naser, K., & Saeid, M. (2018). Capital budgeting practices by non-financial companies listed on Kuwait Stock Exchange (KSE). *Cogent Economics and Finance*, 6(1), 1–18. doi: <https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1468232>
- Arnold, G. C., & Hatzopoulos, P. D. (2000). The theory-practice gap in capital budgeting: Evidence from the United Kingdom. *Journal of Business Finance and Accounting*, 27(5–6), 603–626. doi: <https://doi.org/10.1111/1468-5957.00327>
- Baldacci, E., McHugh, J., & Petrova, I. (2011). Measuring Fiscal Vulnerability and Fiscal Stress: A Proposed Set of Indicators. *IMF Working Papers*, 11(94), 1. doi: <https://doi.org/10.5089/9781455253333.001>
- Batra, R., & Verma, S. (2014). An Empirical Insight into Different Stages of Capital Budgeting. *Global Business Review*, 15(2), 339–362. doi: <https://doi.org/10.1177/0972150914523588>
- Bel, G., & Fageda, X. (2007). Why do local governments privatise public services? A survey of empirical studies. *Local Government Studies*,

- 33(4), 517–534. doi:
<https://doi.org/10.1080/03003930701417528>
- Bennouna, K., Meredith, G. G., & Marchant, T. (2010). Improved capital budgeting decision making: Evidence from Canada. *Management Decision*, 48(2), 225–247. doi:
<https://doi.org/10.1108/00251741011022590>
- Boyne, G. A. (1998). The Determinants Of Variations in Local Service Contracting Garbage In, Garbage Out? *Urban Affairs Review*, 34(1), 150–163. doi:
<https://doi.org/10.1177/107808749803400107>
- Brijlal, P., & Quesada, L. (2009). The use of capital budgeting techniques in businesses: A perspective from the Western Cape. *The Journal of Applied Business Research*, 25(4), 37–46. doi:
<https://doi.org/10.19030/jabr.v25i4.1015>
- Bunch, B. S. (1996). Current practices and issues in capital budgeting and reporting. In *Public Budgeting and Finance*, 16(2), 7–25. doi:
<https://doi.org/10.1111/1540-5850.01066>
- Chan, Y.-C. L. (2004). Use of capital budgeting techniques and an analytic approach to capital investment decisions in Canadian municipal governments. *Public Budgeting and Finance*, 24(2), 40–58. doi:
<https://doi.org/10.1111/j.0275-1100.2004.02402003.x>
- Chaney, B. A., Copley, P. A., & Stone, M. S. (2002). The effect of fiscal stress and balanced budget requirements on the funding and measurement of state pension obligations. *Journal of Accounting and Public Policy*, 21(4–5), 287–313. doi:
[https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(02\)00064-9](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(02)00064-9)
- Cope, G. H. (1992). Walking the fiscal tightrope: local government budgeting and fiscal stress. *International Journal of Public Administration*, 15(5), 1097–1120. doi:
<https://doi.org/10.1080/01900699208524751>
- Denyer, D., & Tranfield, D. (2009). Producing a systematic review. In D. A. Buchanan & A. Bryman (Eds.), *The SAGE handbook of organizational research methods*. In *The Sage handbook of organizational research methods* (pp. 671–689). Diakses dari https://www.mendeley.com/catalogue/Off0533c-01f2-338e-a1a9-6f60a28fa801/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.4&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B8b821bd1-4e6e-4cce-8efd-130b29a0bf5b%7D
- Doss, C. B. (1987). The use of capital budgeting procedures in US cities. *Public Budgeting & Finance*.
- Ekstrom, C. D. (1989). Budgetary practices in smaller units of government. *Public Budgeting & Finance*, 9(2), 76–82. doi:
<https://doi.org/10.1111/1540-5850.00819>
- Ermasova, N. (2013). Capital Budgeting in the States After the Great Recession. *State and Local Government Review*, 45(2), 119–130. doi:
<https://doi.org/10.1177/0160323x13487079>
- Forrester, J. P. (1993). Municipal capital budgeting: An examination. *Public Budgeting & Finance*, 13(2), 85–103. doi:
<https://doi.org/10.1111/1540-5850.00977>

- Frost, G., & Rooney, J. (2021). Considerations of sustainability in capital budgeting decision-making. *Journal of Cleaner Production*, 312, 127650. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127650>
- Globerman, S., & Emes, J. (2021). An International Comparison of Capital Expenditure. In *Fraser Research Bulletin*. Diakses dari <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/international-comparison-of-capital-expenditures.pdf>
- Globerman, S., & Press, T. (2018). Capital Investment in Canada: Recent Behaviour and Implications. *Fraser Research Bulletin*. August, 1–9. Diakses dari <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/capital-investment-in-canada-recent-behaviour-and-implications.pdf>
- Gordon, C. (1998). The fables and foibles of federal capital budgeting. *Public Budgeting & Finance*, 18(3), 54–71. doi: <https://doi.org/10.1046/j.0275-1100.1998.01142.x>
- Ho, A. T. K. (2008). State highway capital expenditure and the economic cycle. *International Journal of Public Administration*, 31(2), 101–116. doi: <https://doi.org/10.1080/01900690701410885>
- Hoffmann, S., Krumholz, N., O'brien, K., & Geyer, B. (2000). How capital budgeting helped a sick City: Thirty years of capital improvement planning in cleveland. *Public Budgeting and Finance*, 20(1), 24–37. doi: <https://doi.org/10.1111/0275-1100.00002>
- Jimenez, B. S. (2009). Fiscal Stress and the Allocation of Expenditure Responsibilities between State and Local Governments: An Exploratory Study. *State and Local Government Review*, 41(2), 81–94. doi: <https://doi.org/10.1177/0160323x0904100202>
- Kloha, P., Weissert, C. S., & Kleine, R. (2005). Someone to watch over me: State monitoring of local fiscal conditions. *American Review of Public Administration*, 35(3), 236–255. doi: <https://doi.org/10.1177/0275074005277435>
- MacKay, R. C. (2017). The Impact of Fiscal Stress on Local Government Fiscal Structures: An Event Study of the Orange County Bankruptcy. *Public Budgeting and Finance*, 37(2), 102–124. doi: <https://doi.org/10.1111/pbaf.12149>
- Marlowe, J. (2012). Capital Budgeting and Spending. *The Oxford Handbook of State and Local Government Finance, July 2018*, 1–28. doi: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199765362.013.0024>
- Marlowe, J. (2013). Strategy, priority-setting, and municipal capital budget reform: Three cases from the great recession. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 25(4), 693–718. doi: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-25-04-2013-B006>
- Martinelli, E. M., & Tunisini, A. (2019). Customer integration into supply chains: literature review and research propositions. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 34(1), 24–38. doi: <https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2017-0162>
- McGranahan, L. (2002). Unprepared for Boom or Bust: Understanding the

- Current State Fiscal Crisis. *Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives*, 26(3), 2–25. Diakses dari <https://www.chicagofed.org/publications/economic-perspectives/2002/3qepart1>
- Michelon, P. S., Lunkes, R. J., & Bornia, A. C. (2020). Capital budgeting: A systematic review of the literature. *Production*, 30, 1–13. doi: <https://doi.org/10.1590/0103-6513.20190020>
- Mullins, D. R., & Pagano, M. A. (2005). Local budgeting and finance: 25 years of developments. *Public Budgeting and Finance*, 25(4s), 3–45. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2005.00002.x>
- Pagano, M. A. (1984). Notes on Capital Budgeting. *Public Budgeting and Finance*, 6(3), 31–40. doi: <https://doi.org/10.1111/1540-5850.00648>
- Pagano, M. A. (1988). Fiscal Disruptions and City Responses Stability, Equilibrium, and City Capital Budgeting. *Urban Affairs Quarterly*, 24(1), 118–137. doi: <https://doi.org/10.1177/004208168802400107>
- Pagano, M. A. (2002). Municipal capital spending during the “boom.” *Public Budgeting & Finance*, 22(2), 1–20. doi: <https://doi.org/10.1111/1540-5850.00070>
- Poterba, J. M. (1994). State responses to fiscal crises: The effects of budgetary institutions and politics. *Journal of Political Economy*, 102(4), 799–821. doi: <http://dx.doi.org/10.1086/261955>
- Rivenbark, W. C., Roenigk, D. J., & Allison, G. S. (2010). Conceptualizing Financial Condition In Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 22(2), 149–177. doi: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-22-02-2010-B001>
- Schmeisser, B. (2013). A systematic review of literature on offshoring of value chain activities. *Journal of International Management*, 19(4), 390–406. doi: <https://doi.org/10.1016/j.intman.2013.03.011>
- Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. *Journal of Cleaner Production*, 16(15), 1699–1710. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020>
- Srithongrung, A. (2010). State capital improvement programs and institutional arrangements for capital budgeting: the case of Illinois. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 22(3), 407–430. doi: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-22-03-2010-B005>
- Srithongrung, A. (2017). Capital Budgeting and Management Practices: Smoothing Out Rough Spots in Government Outlays. *Public Budgeting and Finance*, 38(1), 1–25. doi: <https://doi.org/10.1111/pbaf.12167>
- Sureka, R., Kumar, S., Colombage, S., & Abedin, M. Z. (2022). Five decades of research on capital budgeting – A systematic review and future research agenda. *Research in International Business and Finance*, 60(December 2021), 101609. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101609>
- Tandberg, E., & Allen, R. (2020). Managing Public Investment

Spending during the Crisis. *Public Financial Management*. Diakses dari <https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2020/05/managing-public-investment-spending-during-the-covid-19-crisis>

Vural, C. A. (2017). Service-dominant logic and supply chain management: a systematic literature review. *Journal of Business & Industrial*

Marketing, 32(8), 1109-1124. Doi: <https://doi.org/10.1108/JBIM-06-2015-0121>

Warner, M. E., Aldag, A. M., & Kim, Y. (2020). Pragmatic Municipalism: U.S. Local Government Responses to Fiscal Stress. *Public Administration Review*, 81(3), 389–398. doi: <https://doi.org/10.1111/puar.13196>